



PKL Ingin Dilibatkan dalam Relokasi

DANUREJAN—Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma mendatangi Kantor DPRD DIY, Jumat (5/7). Dalam aksinya, mereka meminta agar dilibatkan dalam proses relokasi PKL Teras Malioboro 2 (TM2) oleh Pemkot Jogja dan Pemda DIY.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman, menjelaskan PKL sampai saat ini tidak pernah dilibatkan dalam proses relokasi setelah menempati Teras Malioboro 2. "Kami tidak pernah dilibatkan dalam proses relokasi, tahu-tahu ada alat berat yang sudah membangun," katanya, Jumat.

Menurutnya, terjadi keterputusan komunikasi antara PKL dengan pemangku kebijakan terkait dengan relokasi ini, sehingga aspirasi dari para PKL tidak tersampaikan. "Kami harus punya kemampuan menawar juga. Di Teras Malioboro 2, banyak PKL yang tidak sejahtera. Kami dipindahkan ke tempat relokasi berikutnya dengan jaminan apa?" katanya.

Penataan Jalan Malioboro sebagai bagian dari Penataan Kawasan Sumbu Filosofi yang telah ditetapkan sebagai *World Intangible Heritage* oleh UNESCO menurutnya masih terdapat persoalan mendasar, yakni

minimnya partisipasi publik dan transparansi informasi khususnya bagi PKL. "Kami PKL Malioboro menjadi rakyat terdampak. Adapun dampak yang dirasakan oleh kami di antaranya pendapatan yang menurun [di Teras Malioboro], sarana infrastruktur yang tidak cukup memadai, dan adanya ketidakpastian informasi," katanya.

Relokasi dari Jalan Malioboro ke Teras Malioboro adalah sebuah pelajaran yang perlu untuk dievaluasi agar relokasi selanjutnya adalah relokasi yang partisipatif dan transparan. "Yang paling penting ialah relokasi yang menjahterakan kami selaku PKL Malioboro yang telah puluhan tahun berdagang di Malioboro," kata dia.

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, yang menemui para pedagang mengaku siap menjembatani persoalan yang dihadapi oleh PKL Malioboro, terutama terkait dengan partisipasi publik dalam relokasi Teras Malioboro 2.

"Kami [Komisi B DPRD DIY] siap menjadi fasilitator antara PKL Malioboro dengan pemerintah, khususnya berkaitan dengan adanya keluhan tidak dilibatkan dalam kebijakan relokasi," katanya.

(Lugas Subarkah)



Puluhan anggota Paguyuban PKL Malioboro saat mendatangi Gedung DPRD DIY, Jumat (5/7).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005